

SKRIPSI

**PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM  
PEMBANGUNAN *WATERFRONT CITY* DI KABUPATEN MAJENE**

HIJRAWATY

Nomor Stambuk: 105640205914



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PENERAPAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*  
DALAM PEMBANGUNAN *WATERFRONT CITY* DI  
KABUPATEN MAJENE**

Skripsi

Sebagai Salah

satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**HIJRAWATY**

NIM : 105640205914

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

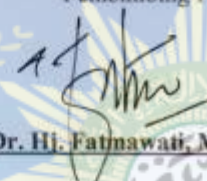
Judul Skripsi : Penerapan *Good Environmental Governance*  
Dalam Pembangunan *Waterfront City* di  
Kabupaten Majene

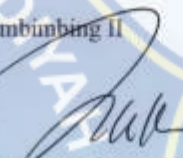
Nama Mahasiswa : Hijrawaty  
Nomor Stambuk : 105640205914  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

  
Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Nurvanli Mustari, S.IP., M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 028/FSP/A.3-VIII/V/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei Tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
4. Ahmad Harakan, S.IP, M.HI


## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hijrawaty

Nomor Stambuk : 105 640 205 914

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar,

2019

Yang Menyatakan,

Hijrawaty

## ABSTRAK

**HIJRAWATY. 2019. Penerapan GoodPembangunan Waterfront City Di KabupatenMajene.**Dibimbing olehpembimbing I Fatmawati danpembimbing II Rudi Hardi.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene. Judul yang diangkat seperti yang diuraikan diatas didasarkan pada permasalahan yang dihadapi yakni “Bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sudah berjalan dengan efektif dan dapat disimpulkan bahwa penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene, meliputi lima prinsip *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* yaitu pemberdayaan masyarakat, transparansi, konsisten, kejelasan, dan penegakan hukum. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan *waterfront city* ini adalah pemerintah dan masyarakat sedangkan faktor penghambat adalah ketersediaan bahan material dan partisipasi masyarakat.

**Kata kunci :Good Environmental Governance, Waterfront City, Pembangunan**

## KATA PENGANTAR

**“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu”**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah, dan Inayah-Nyallah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Penerapan Good Environmental Governance Dalam Pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene”*.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan pa adanya bantuan dan dorongan serta doo dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si** selaku pembimbing I dan, Ayahanda **Rudi Hardi, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesai penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **Nur Aeni S.Sos** dan Ibuanda **Hasnawiah** yang

sangat berjasadansenantiasamembesarkan,  
merawatmemberikanpendidikan sampai padajenjangsaatini, yang  
tidakpernahbosanmendoakan,  
menyemangatidanimotivasisertabantuanmorilmaupunmateril,  
dantaklupakasihsayang yang  
takhentinyabeliauberikankepadasayasehinggapenulisdapatmenyelaikanskripsiini

Taklupapenulishanturkankepada:

1. RektorUniversitasMuhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. DekanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasMuhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. KetuaJurusanIlmuPemerintahan Dr. NuryaniMustari, S.IP., M.Si
4. NurKhaerah S.IP., M.Ipselakudosenpendamping yang setiamendampingidansenantiasameluangkanwaktunya membimbingdan mengarahkanpenelitimulaiawal proposal hinggaskripsiinidapatdiselesaikan.
5. BapakdanibudosenJurusanIlmuPemerintahan yang telahmenyumbangkanilmunya kepadapenulisselamamengenyampendidikan di bangkuperkuliahandanseluruhjajaran staff FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasMuhammadiyah Makassar yang telahbanyakmembantupenulispersoalanadministratif.



6. Pegawai kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene, pegawai kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Majene, staff yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait penelitian ini, serta tokoh masyarakat.

7. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 terkhusus kelas IP.E sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulisi tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat lahjuhu dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk, dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesainya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.

Makassar, 29 Maret 2019

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEAHLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep <i>Good Governance</i> .....	7

B. Konsep <i>Good Environmental Governance</i> .....	14
C. <i>Waterfront city</i> .....	17
D. Konsep MDGs dan SDGs .....	20
E. Kerangka Fikir .....	25
F. Fokus Penelitian .....	25
G. Deskriptif Fokus Penelitian.....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Pengabsahan Data.....	33

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Majene .....	36
B. Hasil Penerapan <i>Good Environmental Governance</i> Dalam Pembangunan <i>Waterfront City</i> Di Kabupaten Majene .....	55
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan <i>Good Environmental Governance</i> Dalam Pembangunan <i>Waterfront City</i> di Kabupaten Majene.....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, surrounded by a wreath of white flowers and green leaves. The text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" is written in an arc at the top, and "MAKASSAR" is written below it. At the bottom, the text "LI-MINGAT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN" is written in an arc. The entire logo is rendered in a light blue and yellow color scheme.

**DAFTAR TABEL**

DAFTAR TABEL 4.1 .....	45
DAFTAR TABEL 4.2 .....	47
DAFTAR TABEL 4.3 .....	49
DAFTAR TABEL 4.4 .....	50
DAFTAR TABEL 4.5 .....	51
DAFTAR TABEL 4.6.....	52
DAFTAR TABEL 4.7 .....	53



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari enam kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km<sup>2</sup> atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat yang secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah kabupaten Mamuju di sebelah Utara, Kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamasa di sebelah Timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Majene tergolong dalam daerah pesisir yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Daerah pantai di Majene ini merupakan salah satu daya tarik atau tujuan wisata. Terdapat beberapa kampung nelayan di pesisir pantai dan laut yang berada di kota Majene yang menunjukkan identitas Majene sebagai salah satu daerah pesisir yang juga berfungsi sebagai pusat penopang kegiatan ekonomi nelayan dan menjadi pusat kunjungan wisata bahari.

Dalam perkembangannya pada tahun 2013 mengalami pencemaran pada pesisir pantai Majene yang sangat memprihatinkan dikarenakan penduduk atau masyarakat di sekitar lingkungan tidak memperhatikan kesehatan lingkungan terutama kebersihan dan keindahan laut maupun pantainya. Sehingga keberadaannya tidak lagi menarik perhatian para wisatawan dan menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin menurun serta dapat mengancam keberadaan ekosistem.

Kabupaten Majene yang secara umum, dalam perkembangan berkelanjutan memiliki visi menuju *good governance* (pemerintahan yang baik),

diharapkan pada penerapan konsep *Waterfront City* tidak sekedar berorientasi pada peningkatan nilai perekonomian pusat dan daerah saja. Tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan hidup (*good environmental*).

Menurut Samekto (Muljono, 2008) yang dimaksud dengan *good environmental governance* adalah pemerintah yang mempunyai visi keberlanjutan dan perlindungan terhadap daya dukung ekosistem. Dengan kata lain, *good environmental governance* merupakan penggabungan antara elemen *good governance* dengan aspek keberlanjutan ekologis. Dalam realita dilapangan selama ini, konsep *Environmental governance* kurang terimplementasikan dengan baik disebabkan oleh beberapa hal seperti terlalu *State Based*, sentralistik, energi masyarakat tidak dimanfaatkan, isu-isu legalistik dan teknokratik, terlalu mengandalkan kekuatan dan instrumen penegakan hukum, kurang memanfaatkan instrumen ekonomi, tidak transparan dan akuntabel.

Dari realita tersebut, secara otomatis manajemen pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bukan berdampak positif melainkan sebaliknya akan berdampak negatif. Pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan *Good Governance* belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh *environmetalism*. Oleh sebab itu, menurut santosa (2008) pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *Good Governance* masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*) agar dapat dikatakan sebagai *good environmental governance*.

Pesisir Kabupaten Majene dekat dengan pusat kota, tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat sehingga wilayah pesisir tersebut hanya

menjadi lokasi wisata yang belum terekspos keberadaannya. Pembangunan *Waterfront City* diharapkan mampu meningkatkan ekonomi Kabupaten Majene khususnya wilayah pesisir, sehingga dengan meningkatnya ekonomi daya jual wilayah pesisir/pantai juga ikut meningkat. Konsep *waterfront* menurut Wen-Cheng Huang dan Sun-Ken Kao dalam (Notanubun dan Mussadun, 2017) adalah tempat lahirnya budaya dan perekonomian, yang mana berawal dari berkembangnya permukiman maupun desa-desa di tepi air, yang berkembang menjadi jalur perdagangan.

Dengan demikian *Waterfront City* menjadi solusi dalam pengelolaan pesisir pantai salah satu konsultan mega proyek tersebut menjelaskan, *waterfront city* merupakan pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air. Dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi pada keperairan tipekonversi, pembangunan kembali, dan pengembangan. Perencanaan pembangunan pesisir pantai yang berkelanjutan juga diperhatikan oleh kawasan perkotaan dimana kawasan pesisir itu berada.

Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara, memperluas wilayah pesisir atau reklamasi pantai, pembangunan *Waterfront City*, dan lain sebagainya. Namun pembangunan *Waterfront City* merupakan perencanaan yang mencakup beberapa aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir. *Waterfront City* dapat dibangun di atas tanah reklamasi dan pembangunan di atasnya mencakup permukiman, taman, pariwisata dan lain sebagainya. Kabupaten Majene sebagai daerah yang kondisi geografisnya berupa dataran rendah yang memiliki kondisi pesisir yang perlu dibenahi atau dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kajian yang terkait dengan pembangunan *Waterfront City* seperti yang



dilakukan oleh Hartono Gusti (2012) dalam kenyataan di Kota Pontianak, pembangunan *waterfront city* sebagai mana diamanatkan dalam peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 belum terlaksana, dimana sepanjang sungai Kapuas dan sungai Landak yang merupakan wilayah bagian kota Pontianak belum terbangun/tertata dengan baik. Masih banyak bangunan/bagian muka bangunan yang tidak menghadap ke sungai, bangunan belum terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan belum menyebar disepanjang sungai Kapuas dan sungai Landak. Dengan demikian, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good environmental governance* dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront*

*city* di KabupatenMajene

### C. ManfaatPenelitian

#### 1. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi penelilitainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang pembangunan *waterfront city* yang belum terungkap dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan befikir mahasiswa–mahasiswa yang berasal dari Kabupaten majene khususnya tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* ini secara berkelanjutan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam upaya penanganan pembangunan *waterfront city* bagi pemerintah Kabupaten Majene dan Dinas terkait dan tentunya bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan masyarakat kawasan pesisir di Kabupaten Majene tentang dampak negative yang di timbulkan dari kegiatan pembangunan *waterfront city* itu sendiri terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem pantai.

## BAB II

### TIJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep *Good Governance*

*Good governance* merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Pemahaman *good governance* Trianingsih (2007) merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, antara bisnis dan pelayanan publik. Pemahaman atas *good governance* adalah bagaimana cara atau usaha dalam suatu perusahaan bisnis serta lembaga pelayanan publik sebagai wujud respek terhadap suatu sistem atau struktur guna meningkatkan mutu produksi usaha. Munculnya suatu konsep *good governance* yang berimbas kepada pemangku kebijakan, hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di negara kita pada tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan dengan baik dapat merubah ekonomi menjadi lebih baik yang akan berdampak pada ekonomi yang kokoh.

Hampir semua pelaku usaha tidak memanajemen struktur atau produksi dengan baik sehingga mengakibatkan munculnya praktek korupsi dan nepotisme. Trianingsih (2007)

“*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi sehingga pencegahan korupsi tidak dapat dibendung atau dicegah. Namun *good governance* diartikan sebagai pemerintah yang baik tetapi yang dimaksud dalam ‘baik’ Trianingsih (2007) aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip awal atau dasar *Good Governance*.”

## 1. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip *good governance* sebenarnya adalah tata pengelolaan pemerintahan yang baik guna menyeimbangkan hubungan antara masyarakat bawah dengan masyarakat atas untuk memperbaiki segala aspek kehidupan. Namun pengelolaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sehingga prinsip *Good Governance* nampaknya dalam tatatan ilmiah saja, prinsip dasar GG pada organisasi KAP Trianingsih (2007) meliputi:

- 1) Keadilan yaitu akuntan publik harus memberikan laporan keuangan yang diperiksa dan harus bersikap independen dan menegakkan keadilan akuntan publik itu sendiri.
- 2) Bersikap terbuka terhadap informasi keuangan pada klien yang di audit
- 3) Akuntabilitas menjelaskan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan dan pelaporan
- 4) Bertanggung jawab serta bersikap profesional dan melaksanakan profesinya

## 2. Bentuk-bentuk *Good Governance*

Ada tiga bentuk kecenderungan Daradjat (2010) global yang sedang melanda dunia. Pertama, adalah kecenderungan peralihan dari konsep masyarakat bangsa (*nation society*) kearah masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat dengan peradaban plural, memahami arti penuh HAM serta demokratis. Kedua, perubahan dari sistem perekonomian dengan perencanaan terpusat kearah ekonomi pasar dan keadilan. Ketiga, kecenderungan pengelolaan negara dari hanya oleh sektor publik kearah konsep *good governance*. Beberapa terjemahan yang digunakan untuk istilah *good governance*. Seperti Bintoro Tjokro Amidjojo menggunakan istilah pengelolaan yang baik, sedangkan Sofyan Effendi menggunakan istilah pengelolaan yang amanah. Jelasnya bahwa *good governance*

merupakan paradigma baru dalam sistem pengelolaan negara (administrasi negara), yang melibatkan tiga domain kekuatan, yaitu sektor pemerintah (*government*), sektor dunia usaha (*private sector*), dan sektor masyarakat (*civil society*). Pada kesempatan lain Mustopadidjaja mengemukakan GG ialah paradigma baru dari sistem dan proses dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, yang mengindahkan prinsip-prinsip: supremasi hukum, jujur, dan akuntabilitas. Komitmennya sangat tinggi untuk tegaknya nilai dan prinsip: desentralisasi, efektivitas, efisiensi, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*) yang bertanggung jawab dan berdaya saing.

Dari ketiga domain Daradjat (2010) penyelenggaraan *good governance*, masing-masing memiliki fungsi pengelolaan yang paling memungkinkan. Sektor publik lebih berkaitan dengan pengarahannya kebijakan pembangunan serta pengendalian dan pengaturan hidup masyarakat. Sektor privat lebih berkaitan dengan aspek produksi, pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan sektor masyarakat mengenai hal-hal yang mengenai dengan kepentingan warga seperti: keamanan, kesejahteraan lingkungan, perlindungan konsumen dan lain sebagainya.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo Daradjat (2010) mengatakan bahwa: sektor publik lebih berperan sebagai *facilitating* dan *enabling* (sehingga memungkinkan masyarakat dalam melakukan ekonomi dan sosial), serta menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor privat berfungsi untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta penghasilan melalui produksi barang dan jasa. Sedangkan sektor masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik serta menjaga dan mengembangkan *rules of the games* dan *rules of ethics* yang baik

dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Secara fungsional, governance dapat diuji dari apakah *good governance* sudah diterapkan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. *World Bank* memberikan definisi: *That way state power is used in managing economic and social resources for development of society.*

Sementara *United Nations For Development* (UNDP) mendefinisikan: *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels.* Oleh karena itu menurut dalam jurnal Daradjat (2010) definisi tersebut, governance mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic, politic dan administrative.* *Good governance* mempunyai temuan atau hasil akhir pada keadilan (*equity*), kemiskinan (*poverty*) dan kualitas hidup (*quality of life*). *Political governance* mempunyai implikasi (*policy process*) untuk terwujudnya formulasi kebijakan (*policy formulation*). Sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan (*policy implementation*).

Domain negara (*state*), di dalamnya terdiri dari sektor pemerintah, termasuk lembaga-lembaga politik serta lembaga-lembaga publik lainnya. Domain swasta (*private*) meliputi perusahaan-perusahaan swasta dan pelaku ekonomi yang mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik dan ekonomi dan berindikasi terhadap kondisi perusahaan dan dunia usaha. Sedangkan masyarakat (*society*) meliputi individu, kelompok, lembaga swadaya. Daradjat (2010)

Daradjat (2010) pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional melalui kemandirian, pembangunan berkelanjutan. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila secara efisien. Berdasarkan pengertian

pada: Pertama, orientasi ideal negara untuk mencapai kinerja yang baik dan *good governance* secara ideal, efektif, dan efisien.

Orientasi yang pertama mengacu pada demokratisasi dengan elemen-elemen seperti: legitimasi pemerintah, akuntabilitas, terjaminnya hak azasi manusia, otonomi kekuasaan dan kewenangan terhadap kontrol yang meliputi kompetensi pemerintah serta efektivitas dan efisiensi struktur mekanisme politik administrasi Daradjat (2010)

Berdasarkan Daradjat (2010) hal diatas UNDP kemudian mengajukan sembilan karakteristik *good governance*, yaitu:

1. *Participation*, setiap orang di Negara diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat guna mewakili pemikiran atau perasaannya. Partisipasi ini atas kebebasan berserikat, berbicara dan bersifat konstruktif
2. *Rule of Law*, hukum pidana dan perdata dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama tentang hak asasi manusia.
3. *Transparancy*, untuk adanya transparansi maka harus ada kebebasan informasi yang dapat dimengerti dan dimonitor.
4. *Responsiveness*, yaitu cepat tanggap terhadap segala isu dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
5. *Consensus Orientation*, yaitu dapat melayani dan memahami berbagai kepentingan yang berada dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya melalui konsensus dapat menetapkan pilihan yang dinilai paling memiliki kepentingan lebih luas.
6. *Equity*, semua warga dapat memperoleh rasa keadilan dan yang berhak meningkatkan kesejahteraan.

7. *Effectiveness* and efficiency, yaitu pencapaian tujuan dengan indikator output, outcome bahkan impact, dimana ada perhitungan ekonomis antara sektor input dengan outputnya.
8. *Accountability*, para aktor baik dalam state, private maupun society, selalu bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang dibuat dan dilakukan langsung pada masyarakat.
9. *Strategic vision*, para aktor harus memiliki perspektif yang jauh kedepan (*visioner*), berfikir holistik dan komprehensif sehingga mampu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi secara dini.

Dari tiga domain yang terlibat dalam *good governance*, maka domain negara nampaknya memegang peranan paling penting dalam mewujudkan *good governance*, yaitu karena adanya fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi penyelenggaraan negara, transparansi, desentralisasi kekuasaan baik regional maupun internal, serta penciptaan pasar yang kompetitif.

## 2. Aturan yang terkait dengan *Good Governance*

Arianto (2013) mengatakan bahwa, untuk menjamin (*Good Governance*) sebagai kaidah-kaidah seperti, (*transparency*), keterbukaan hasil kerja (*disclosure*), pertanggungjawaban publik (*accountability*), sebagai syarat pemerintahan yang baik di Indonesia.

Rambu-rambu pelaksanaan asas umum asas umum GG Indonesia Arianto (2013) sesungguhnya terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam UUD'45 terdapat beradap yang menunjukkan bahwa sesuai cita cita luhur pancasila. Asas GG merupakan pertanggung jawaban umum terhadap Pengelolaan pemerintahan yang baik. (*Good governance*) atau asas-asas umum pemerintahan Arianto (2013) yang baik yang dikenal di Indonesia antara lain:



1. Asas Kecermatan Formal.
2. Asas *Fair Play*.
3. Asas Pertimbangan.
4. Asas Hukum Formal.
5. Asas Kepastian Hukum Material.
6. Asas Kepercayaan yang ditimbulkan.
7. Asas Persamaan.
8. Asas Keseimbangan

#### **B. Konsep *Good Environmental Governance***

##### 1. Pengertian *good environmental governance*

*Environmental governance* merupakan interaksi dengan lingkungan hidup kita kelola dengan bingkai konseptual. *Environmental governance* menurut Faisah (2015) adalah pada keperluan untuk memahami dan mengelola antara sistem sosial dengan ekosistem, lebih dari itu pengeloaan sistem sosial perlu dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai ekologis, dan sebaliknya ketahanan ekosistem bias dipelihara melalui pengelolaan sistem sosial oleh kaidah-kaidah ekologis. *Good Environmental Governance* pemerintahan yang baik di bidang diterjemahkan menjadi Tatapraja Lingkungan.

Putri (2013) bahwa penerapan prinsip-prinp *Good Environmental Governance* dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan persyaratan *Good Governance*. Peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam harus mendukung perwujudan pemerintahan yang baik dan memberikan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem. Dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* dapat dilihat bagaimana perangkat perundang-undangan dalam bidang sumber daya alamnya.

Menurut Putri 8 kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan/ekosistem atau tidak, yaitu:

- 1) Pemberdayaan masyarakat,
- 2) Transparansi,
- 3) Desentralisasi yang demokratis,
- 4) Pengakuan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan,
- 5) Pengakuan masyarakat umum
- 6) Konsisten dan harmonis
- 7) Kejelasan
- 8) penegakan.

Kedelapan kriteria di atas merupakan *good environmental governance* yang mempunyai visi perlindungan lingkungan hidup terutama melalui penguatan masyarakat sipil.

## 2. Hambatan atau Ancaman Penerapan *Good Environmental Governance*

Ulum (2017) yang kaya dan beragam merupakan tantangan yang kian kompleks. Ancaman lingkungan akan memerlukan respons global, regional, nasional dan lokal yang mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai ancaman global terhadap keberlangsungan ekosistem, antara lain:

1. Berkurangnya hutan tropis dunia, menyebabkan hilangnya sumber daya, erosi tanah, banjir, dan hilangnya keanekaragamnya hayati.

2. Kekurangan sumber daya air bersih
3. Menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan sumberdaya kelautan
4. Menipisnya sumberdaya energy yang tak terbarukan

Dari sekian ancaman tersebut, sebagai misal, ekosistem pesisir Asia Tenggara yang sedang menghadapi degradasi yang parah. Sebelas persen dari terumbu karang nenar-benar rusak, 48 persen telah krisis, dan 80 terancam punah, dan sekitar 70 persen tutupan hutan tersebut telah hilang. Ekosistem rumput laut juga mengalami kerusakan, mulai dari 20 persen hingga 60 persen. Degradasi habitat pesisir/laut dan hilangnya keanekaragaman hayati yang terkait tersebut bisa memiliki implikasi lintas batas negara. Peningkatan lalu lintas laut karena perdagangan internasional juga menimbulkan resiko dalam bentuk limbah air. (Contreras, 2008:158)

### 3. Aturan dan kebijakan dalam *Good Environmental Governace*

UU Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan lingkungan hidup adalah suatu kesatuan dengan berbagai sumber daya sehingga manusia serta makhluk hidup lainnya dapat hidup dengan baik.

Secara umum dapat diartikan sebagai ruang seluruh makhluk hidup alam membuat suatu kesatuan, dan saling berinteraksi sehingga mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dalam pembahasan kualitas lingkungan sangat penting bagi mutu lingkungan karena merupakan pedoman pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan adalah pembahasan mutu lingkungan pengelolaan lingkungan.

Dalam kondisi lingkungan kaitannya dengan mutu lingkungan adalah pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan diartikan sebagai yang making tinggi kebutuhan dasar tersebut akan tinggi kualitas lingkungan

hidup dan sebaliknya. Karena mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan tersebut dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam memenuhi kondisi lingkungan tersebut. Makin tinggi kebutuhan dasar tersebut, makin tinggi pula mutu lingkungan hidup dan sebaliknya.

### C. Konsep *Waterfront City*

Kawasan *waterfront* atau tepian air seperti laut, danau, sungai, dan sejenisnya. Istilah *Waterfront* dalam Bahasa Indonesia menurut Echols (2003) diterjemahkan sebagai daerah tepi laut, bagian suatu wilayah yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan. Umumnya menurut Munandar (2013) *Waterfront* terdapat dermaga atau marina sebagai jantung dengan kesibukan lalu lintas perdagangan yang menggunakan kapal, perahu, juga dapat di jadikan tempat rekreasi yang menarik. Fasilitas pelabuhan, fasilitas kapal, taman bermain, museum, hotel, restoran, dan perencanaan pembangunan kota-kota tepi pantai serta budaya atau *Waterfront City* ialah konsep perencanaan kota baru yang berfokuskan terhadap kultur dan budaya.

Berdasarkan jenis pengembangan pesisir, menurut Fitrianto (2014) yaitu ada 3 jenis: konservasi, pembangunan kembali, dan pengembangan.

- a. Konservasi, penataan ulang *waterfront* kuno atau lama. Konservasi dilestarikan, dilindungi, dipelihara, dan pugar. Karena fungsional bangunan-bangunan yang mempunyai nilai budaya, seni, dan sejarah aksiteksturnya.
- b. *Redevelopment* menghidupkan kembali *waterfront* lama yang telah lama digunakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan kota dengan cara memperbaiki kembali pantai

c. *Development* bagaimana cara menciptakan *waterfront* yang akan memenuhi kebutuhan kota

Sedangkan Tipologi *waterfront* menurut Breen dalam Tangkuman DJ dan Tondobala T (2011) bahwa *waterfront* berdasarkan pertemuannya dengan badan air, maka dapat dibedakan menjadi :

a) *Waterfront* Tepian Sungai

Merupakan *waterfront* yang terjadi ketika adanya pertemuan langsung antara daratan dan badan air yang berupa tepian sungai.

b) *Waterfront* Tepi Laut

Merupakan lahan *waterfront* yang karena di pertemuan langsung daratan dengan badan air yang berupa pantai dan tepian laut.

c) *Waterfront* Tepi Danau

Merupakan *waterfront* yang terjadi karena adanya pertemuan langsung dengan daratan dan badan air yang berupa tepian danau, pada umumnya untuk pengembangannya sebagai fungsi khusus.

Di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten yang memiliki rencana pengembangan konsep *waterfront city*. Informasi yang diperoleh dari [mandarnews.com](http://mandarnews.com) (2017) bahwa *Waterfront City* ini akan mencakup wilayah pantai kecamatan Banggae dan Kelurahan Baurung dan pembangunannya terbagi atas beberapa segmen. Disebutkan juga bahwa Rencana mega proyek tersebut telah bersinergi dengan rencana terkait diantaranya RP2KPKP, RDTR kawasan, RTRW Kabupaten, RPJMD, RTRW Provinsi dan RZWP3K Provinsi.

Sebagai konsultan mega proyek, menurut Yusuf (2017) dalam wawancara [mandarnews.com](http://mandarnews.com) menyebutkan bahwa *Waterfront City* merupakan

pengembangan tepi air. Dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi pada ke perairan tipe Konservasi, Pembangunan kembali, dan pengembangan

#### **D. Konsep MDGs dan SDGs**

##### **1. MDGs**

###### **a. Pengertian dan Tujuan MDGS**

*Millennium development goals (MDGs)* ialah deklarasi *Millenium* hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang telah dijalankan pada Septemper tahun 2000. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
- 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
- 3) Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak,
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu,
- 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
- 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
- 8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

###### **b. Perkembangan MDGS di Indonesia**

Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya termasuk Indonesia dengan memonitoring MDGs untuk mendukung dan memberikan bantuan kepada negara-negara untuk mencapai target target tujuan MDGs.

Sebagai komitmen untuk melaksanakan serta menjadi baian yang tidak terpisahkan dan seluruh program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Potret masyarakat dapat dilihat melalui kualitas pendidikan, kesehatan, banyaknya jumlah penduduk, banyaknya rumah layak huni, bebas dari gangguan alam beserta aman. Penduduk, pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2010 yang artinya penduduk sejahtera dan makmur. Namun, keberhasilan itu dapat dibantah oleh aliansi rakyat Indonesia yang menilai pencapaian MDGs gagal karena seiring kemiskinan yang semakin meningkat dan tidak adanya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, pangan, kerusakan lingkungan, serta konflik agraria.

## **2. SDGs**

### **a. Pengertian dan Tujuan**

Agenda pembangunan dunia yang bertujuan mensejahterahkan manusia dan planet bumi serta sebagai tujuan pembangunan bersama oleh PBB Jadi kerangka pembangunan situasi dunia yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang

sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs.

Bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dari SDGs yang dikutip dari Litbang Depkes RI antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuannya untuk menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
- 4) Membangun serta mendorong industry infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta untuk membina inovasi.
- 5) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pekerjaan yang layak dan terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
- 8) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.



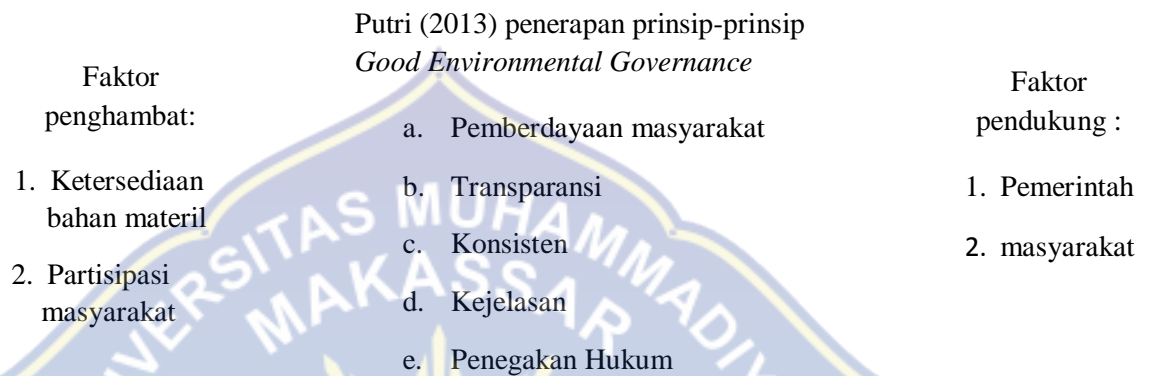
- 9) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
- 10) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
- 11) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 12) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
- 13) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
- 14) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 15) Melestarikan pembangunan berkelanjutan secara efisien.
- 16) Memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
- 17) Melindungi serta mengelola hutan secara berkelanjutan dan menghentikan kerugian keanekaragaman hayati

b. Perbedaan SDGs dengan MDGs

Perbedaannya yaitu SDGs melanjutkan tujuan utama dari MDGs yaitu perihal penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di dunia. Kemudian muncul sebuah dokumen usulan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Salah satu yang mempunyai kebutuhan universal yaitu pertumbuhan ekonomi inklusi sosial perlindungan lingkungan. SDGs merupakan aspek kehidupan yang di iringi dengan momentum dan keberhasilan MDGs untuk menanggapi ketidaksetaraan pertumbuhan ekonomi, pemukiman masyarakat, perdamaian dan keadilan.

## E. Kerangka Fikir

### Penerapan *Good Environmental Governance* dalam Pembangunan *Waterfront City*



Terwujudnya penerapan *Good Environmental Governance* dalam Pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene

Gambar 2.1 Kerangka Fikir

## F. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam menjawab rumusan masalah diatas yaitu:

*Environmental governance* merupakan konsep dalam ekologi politik dan kebijakan lingkungan yang menganjurkan pembangunan berkelanjutan yang memperdulikan lingkungan sebagai pertimbangan tertinggi untuk mengelola sebuah negara sebagai kegiatan politik, sosial dan ekonomi. *Environmental governance* juga membicarakan tentang bagaimana penyusunan yang baik secara formal ataupun informal, institusi, dan faktor lain yang menentukan bagaimana sumber daya atau lingkungan digunakan sebaik mungkin.

## G. Deskriptif Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut

1. Penerapan adalah suatu perbuatan atau mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Adapun aspek yang akan dilihat dari penerapan yaitu

1. Pemberdayaan masyarakat

Yaitu proses pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Majene dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan membuat program KOTAKU dan telah membentuk 3 KSM di masing-masing tempat pembangunan untuk pemasangan peping pembangunan WC dan MCK.

2. Transparansi

Bagaimana keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan dalam membangun kawasan Majene *waterfront city*

3. Konsisten

Konsisten adalah kunci sebuah keberhasilan dalam pembangunan *waterfront city* dan dapat menciptakan tata kelola yang baik.

4. Kejelasan

Proses pelaksanaan yang sejak tahun 2017 mulai membangun jalan tetapi secara bertahap dikarenakan pendanaan pembangunan dan alat material yang kurang membuat pembangunan dilakukan secara bertahap tidak secara bersamaan.

#### 5. Penegakan hukum

Penegakan hukum dalam hal ini yaitu mengkaji lebih awal bagaimana dampak lingkungan yang akan ditimbulkan sebelum itu telah dibuatkan amdal. Dalam amdal tersebut memberikan rekomendasi bahwa boleh melakukan pembangunan kawasan *waterfront city* sekaligus hal-hal yang mungkin akan dilakukan yaitu perubahan terhadap ruang sudah tertuang dalam amdal tersebut.

2. *Good environmental governance* dalam hal ini adalah interaksi dengan lingkungan hidup yang di kelola dengan bingkai konseptual.
3. *Waterfront city* dalam hal ini adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau.
4. Faktor yang mempengaruhi penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* yang dimaksud dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor yang pendukung dan faktor penghambat penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene
5. Terwujudnya penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 2 (Dua) bulan. Lokasi penelitian pada kantor Bappeda Kabupaten Majene dan kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Majene. Dimana dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene dengan alasan memilih lokasi penelitian, bahwa penulis ingin mengetahui penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2012).

##### 2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai proses dalam melihat pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Majene serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi kondisi dan latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (*urgen*) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang

dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, adapun yang akan menjadi informan adalah:

1. Personil Bappeda Kabupaten Majene
2. Personil PU (Pekerjaan umum)
3. Masyarakat

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat kondisi dan realitas secara langsung di lapangan. Dengan teknik ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai basis penelitian yang berlokasi di wilayah pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene
- b. Wawancara mendalam, pertanyaan yang diajukan peneliti berupa pertanyaan lisan dengan tetap merujuk pada pedoman wawancara yang ada, dan jawaban informan dijawab secara lisan. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan yang terpilih sebagai sebuah teknik untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan masalah yang diteliti agar peneliti dapat memperoleh data untuk mendukung validitas hasil penelitian yang dilaksanakan.
- c. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Penerapan *Good Environmental Governance* Dalam Pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, dalam mengorganisasi data, serta memilih menjadi suatu yang dapat dikelola, mengintesis dan menemukan pola, serta apa yang penting dan untuk dipelajari sehingga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong,2012:248).

### **a. Redaksi data**

Merupakan proses dalam seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data yang kasar yang dilaksanakan dalam penelitian dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dimulai dari sebelum pengumpulan pelaksanaan penelitian pada saat pengumpulan data berlangsung.

### **b. Penyajian data**

Sajian singkat adalah suatu informasi dari yang dapat memungkinkan kesimpulan penelitian akan dilakukan. Melihat suatu penyajian data tersebut, peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi serta untuk mengerjakan suatu analisa atau suatu tindakan lain berdasarkan tindakan tersebut.

### **c. Penarikan kesimpulan**

Dalam kegiatan ini peneliti melakukan kegiatan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Akan tetapi kesimpulan itu masih bersifat sementara sampai penelitian berakhir baru dapat diambil kesimpulan yang sesungguhnya. Jika laporan penelitian mengalami kesulitan, maka diadakan



proses pengumpulan data lagi dari awal sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan.

### **G. Keabsahan Data**

Salah satu yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan dalam penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127) teknik pengumpulan data triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber, triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, obsrvasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang penggambaran umum Bappeda di Kabupaten Majene menjadi tempat atau lokasi penelitian.

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Majene

##### 1. Sejarah

Majene adalah salah satu dari lima Kabupatend di Provinsi Sulawesi Barat. Sewaktu masih tergabung dalam Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene tergabung sebagai kawasan yang dulunya disebut *Afdeling* mandar. Yang mana ibukotanya berada di *Onderafdeling* Majene. Adapun *Onderafdeling* lain ialah *Onderafdeling* Polewali, *Onderafdeling* Mamasa, dan *Onderafdeling* Mamuju.

Pembagian itu berdasar *Staatblad* No. 325 Tahun 1916. Selain *Afdeling* mandar, ada sepuluh *Afdeling* lain di pulau Celebes (Sulawesi). Khusus kresidenan Celebes Selatan ialah: *Afdeling* Makassar, *Afdeling*

Bantaen, *Afdeling* Luwu, *Afdeling* Pare-pare, dan *Afdeling* Buton-Lawai. Berdasar Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 dimana sistem *Afdeling* atau *Onderafdeling* dihapus, *onderafdeling-onderafdeling* di atas ada yang digabung, ada tetap berdiri sendiri tapi dengan istilah yang berbeda. *Onderafdeling* Polewali dan *Onderafdeling* Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mamasa, dan *Onderafdeling* Majene menjadi Kabupaten Majene, dan *Onderafdeling* Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju.

Dengan demikian, *Afdeling* Mandar pun dihapus, dilebur bersama *Afdeling* lain di bagian Selatan yang kemudian menjadi Provinsi Sulawesi Selatan. Di tahun 2004 berdasar UU No. 26 tahun 2004, yang dulunya tergabung dalam *Afdeling* Mandar menjadi daerah yang disebut Provinsi Sulawesi Barat. Pun dibentuk daerah otonomi baru yakni Kabupaten Polewali Mamasa dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Demikian juga Kabupaten Mamuju, dibagi menjadi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Dengan latar belakang historinya di atas, sampai saat ini Kabupaten Majene dikenal sebagai ibukota Mandar (tua). Selain sebagai posisinya ibukota *Afdeling* Mandar, juga jauh sebelumnya, di masa kerajaan-kerajaan, salah satu kerajaan yang ada di (Kabupaten) Majene dianggap sebagai “*indoq*” (ibu) dalam persekutuan tujuh kerajaan di pesisir pantai, *Pitu Baqbana Binanga*. Yaitu Kerajaan Sendana posisinya sederajat dengan Kerajaan Balanipa

(saat ini masuk Kabupaten Polewali Mandar) yang disebut “kamaq” (ayah).

Selain sebagai ibukotanya Mandar, Kabupaten Majene juga disebut Kota Pendidikan sebab dulunya pusat pendidikan di *Afdeling* Mandar adalah Majene. Itulah sebab dalam kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, diputuskan bahwa perguruan tinggi negeri akan ditempatkan di Kabupaten Majene. Dengan kata lain, aktivitas pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan akan ditempatkan di Kabupaten Majene. Ada dua pendapat mengenai asal mula penamaan Majene, misalnya yang terdapat dalam Sila 2006 dan Hafid 2000. Pendapat pertama, yang umum diamini beberapa tokoh masyarakat Majene, mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata “manjeqneq” yang bisa berarti berwudhu. Konon, pada tahun 1875 di saat penjajah Belanda pertama kali mendarat di pesisir Majene, mereka bertemu dengan seseorang yang kebetulan sedang “manjeqneq”. Orang belanda bertanya kepada orang yang berwudhu tersebut tentang nama negeri yang didaratanya. Sebab tidak saling mengerti bahasa, orang yang berwudhu mengira orang asing orang asing tersebut bertanya apa yang sedang dia lakukan. Maka dijawablah “*manjeqneq*”. Pikir itulah jawaban atas pertanyaan yang diajukannya, orang belanda akhirnya menganggap daerah yang didatanginya bernama Ma(n)je(q)ne(q).

## 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Majene adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km dan berpenduduk sebanyak 169.172 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada  $2^{\circ} 38' 45'' - 3^{\circ} 38' 15''$  Lintang Selatan dan antara  $118^{\circ} 45' 00'' - 119^{\circ} 4' 45''$  Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebesar 95% dari total wilayah perairan Kabupaten Majene masuk dalam alur pelayaran Selat Makassar, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan masuk memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat kurang lebih 146 km. Letak geografis Kabupaten Majene berada dalam jalur lintas barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Secara kondisi Geomorfologi Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5 - 1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu : Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang; Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae dan Pamboang; Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Daerah Tubo) dan Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir pantai barat.

## **2. Visi dan Misi**

Visi :

Kepala daerah terpilih telah merumuskan visi Kabupaten Majene tahun 2016 – 2021 berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

“MAJENE PROFESIONAL, PRODUKTIF & PROAKTIF 2021”

Profesional: memiliki kompetensi dan mampu mengoptimalkannya dalam melaksanakan pekerjaannya.

- Tata kelola pemerintahan profesional diwujudkan melalui pengoptimalan penyelenggaraan otonomi daerah di berbagai bidang dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Aparat pemerintahan profesional diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah;
- Sumber daya manusia profesional diwujudkan melalui peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan keterampilan kerja masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama dan budaya lokal daerah.

Produktif; keadaan dimana sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya.

- Majene produktif diwujudkan melalui perkuatan dan peningkatan perekonomian kerakyatan dengan optimalisasi dari potensi daerah (Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata).

Proaktif; mampu mengidentifikasi kesempatan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berorientasi ke masa depan.

- Pemerintah Daerah proaktif diwujudkan dengan menghadirkan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pemenuhan segala kebutuhan masyarakat masyarakat menuju masyarakat/.
- Majene Sejahtera (tercukupinya kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan) yang selanjutnya mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Majene yang layak dan bermartabat; Penganggaran proaktif diwujudkan dengan upaya mendayagunakan segala potensi sumber daya keuangan, baik dari APBD Kabupaten Majene maupun sumber pembiayaan lain (APBDP, APBN, dan pelibatan sektor swasta) dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah;
- Masyarakat proaktif diwujudkan dengan memberdayakan segala komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan.

M i s i:

Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sembilan butir sebagai berikut:



1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene yang berkualitas;
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata;
4. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek aspek pembangunan;
6. Supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan.

### **3. Arah kebijakan**

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya.

Arah kebijakan yang disusun tidak dapat dilepaskan dari strategi yang dijelaskan sebelumnya dalam penerapan program “Majene Profesional, Produktif, dan Proaktif (MP3 2021)” yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Arah kebijakan pembangunan

dimaksudkan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kesejahteraan social Masyarakat, Mengoptimalkan Sumber Daya Alam, Peningkatan pertumbuhan perekonomian dengan kemandirian masyarakat, percepatan pembangunan merata dan supremasi hukum dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene yang berkualitas
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
3. Mewujudkan Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pariwisata
4. Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan
6. Supremasi hukum dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan

#### **4. Profile Bappeda Kabupaten Majene**

##### **1. Visi Misi Dan Strategi Kantor Bappeda**

**a. Visi**

Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Majene yang optimal, didukung sumber daya manusia yang profesional, produktif, dan proaktif.

**b. Misi**

- Meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan
- Meningkatkan ketersediaan dan pengolahan data, informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk rencana pembangunan.

**2. Keadaan Geografis**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene (Bappeda) terletak di Jalan Seyka Abdul Mannan ± 146 km dikecamatan banggae sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau ± 300 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Majene terletak pada posisi 2o 38' 45" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 3o 38'15" Lintang Selatan (LS) dan 118o 45' 00" Bujur Timur ( BT) sampai dengan 119o 4'45" Bujur Timur (BT) Kabupaten Majene berbatasan dengan

Sebelah Utara : Kabupaten Majene

Sebelah Timur : Kabupaten Polman dan Kabupaten  
Mamasa : Teluk Mandar  
Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 94,84 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terbagi menjadi delapan Kecamatan, yang terdiri dari 82 desa/kelurahan.

Sebelah Selatan.

### 3. Keadaan Demografis

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian migrasi serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Profil ini kami sajikan secara umum data wilayah, jumlah penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan agama dapat dilihat dalam tabel berikut :

#### 1. Jumlah penduduk

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola permukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.



**Tabel 1: Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin  
di Kabupaten Majene, 2016**

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio jenis kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Banggae	19.626	20.239	39.865	96,97
2.	Banggae Timur	14.579	15.744	30.341	92,71
3.	Pamboang	10.563	11.299	21.862	93,49
4.	Sendana	10.599	11.552	22.151	91,75
5.	Tamero'do	5492	5726	11.218	95,91
6.	Tubo Sendana	4306	4432	8738	97,16
7.	Malunda	8975	9174	18.149	97,83
8.	Ulumanda	4449	4359	8808	102,06

*Sumber BPS Kabupaten Majene*

Penduduk Kabupaten Majene berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 163.896 jiwa yang terdiri atas 80.068 jiwa penduduk laki-laki dan 83.828 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015 penduduk Kabupaten Majene mengalami pertumbuhan sebesar 1,72 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,86 persen dan penduduk

perempuan sebesar 1,58 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,51. Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene tahun 2016 mencapai 173 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam penduduk tertinggi kecamatan Kecamatan Banggae dengan kepadatan sebesar 1.616 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di sebesar 20 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu jumlah rumah pertumbuhan sebesar 2,18 persen dari tahun 2015.

## **2. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Bersumber dari BPS Kabupaten Majene, angkatan kerja (dengan pengertian penduduk 10 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan) setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

**Tabel 2: Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten****Majene Tahun 2016**

No.	Karakteristik	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Penduduk Usia Kerja (PUK)	67.870	71.294	101.088	108.398	75.023	3,81
2.	Angkatan kerja (AK)	67.870	71.294	61.835	73.122	75.023	3,16
	a. Bekerja	65.522	69.051	60.490	71.618	70.890	2,59
	b. Pengangguran (mencari kerja)	2.348	2.243	1.253	1.504	4.133	35,53
3.	Bukan angkatan kerja	27.575	28.067	39.253	35.276	35.747	8,21
	a. Sekolah	9.010	8.273	8.296	12.836	11.249	8,61
	b. Mengurus RT	18.563	19.794	23.180	19.076	18.833	1,19
4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	71,11	71,75	61,17	67,46	67,73	-0,79
5.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	3,46	3,15	2,18	2,06	5,51	30,55
6.	Tingkat kesempatan kerja (TKK) (%)	96,54	96,85	97,82	97,94	94,49	-0,52

*Sumber: BPS Kabupaten Majene, 2016*



Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode 2011 – 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Majene menunjukkan tren negatif di angka -5,14%, hal ini disebabkan oleh meski angkatan kerja bertumbuh sebesar 7,74%, akan tetapi ada banyak warga Majene yang bersekolah kembali atau melanjutkan pendidikan (penduduk yang bersekolah bertumbuh sebesar 42,46%). Jadi dapat dimaknai bahwa tren negatif TPAK merupakan investasi angkatan kerja dalam rangka re-training untuk semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja di Majene. Selain itu, patut diperhatikan pula bahwa dalam periode 2011 – 2014 angka TPT berhasil ditekan sebesar -40,46% dan TKK di kisaran  $\pm 97\%$  menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang luas untuk bekerja di Majene. Sesuai dengan karakteristik wilayah, komposisi penduduk yang bekerja didominasi pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, namun setiap tahunnya terus menurun. Lapangan usaha yang mulai menarik perhatian adalah sektor jasa-jasa dan perdagangan, dan sektor yang masih kurang menarik minat angkatan kerja adalah sektor manufaktur terlihat pada tabel 2.16 berikut ini:

**Tabel 3: Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan**

**Usaha dan Jenis Kelamin**

Sl u m b e r : NO.	LAPANGAN USAHA	LAPANGAN USAHA (%)	LAKI- LAKI (%)	PEREMPUAN (%)
1.	Pertanian, perikanan dan kehutanan	38,81	67,83	32,17
2.	Manufaktur	7,72	26,49	73,51
3.	Perdagangan	17,12	25,24	74,76
4.	Jasa-jasa	24,18	53,91	46,09
5.	Lainnya	12,18	95,61	4,39

*Angkatan Kerja Nasional, 2016*

**3. Pendidikan**

Pembangunan bidang Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karenamanusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam

bangku pendidikan. Hingga tahun 2016 di Kabupaten Majene terdapat 196 unit SD/MI, 56 unit SLTP/MTs, dan 35 unit SLTA/Sederajat. Sedangkan Jumlah tenaga pengajar untuk tingkat D/MI sebanyak 2.473 guru, tingkat SLTP/MTs sebanyak 994 guru, dan tingkat SLTA/Sederajat 57 sebanyak 893 guru. Jumlah murid SD/MI sebanyak 25.530orang, SLTP/MTs ebanyak 9.516 orang, dan untuk SLTA/Sederajat sebanyak 9.133 orang.

**Tabel4 :Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD/ MI, SLTP/ MTS, SLTA/ MA di Kabupaten Majene, 2016**

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Guru
1.	SD	117	2128	23.546	11,06
2.	MI	19	345	1948	5,75
3.	SLTP	33	594	7056	11,88
4.	MTS	23	400	2460	6,15
5.	SLTA	7	249	3242	13,02
6.	SMK	15	433	4560	10,53
7.	MA	13	211	1331	6,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Dep Agama Kabupaten Majene

**Tabel 5 :Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-  
Kanak  
Serta Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan di  
Kabupaten Majene , 2016**

NO.	KECAMATAN	SEKOLAH	GURU	MURID	RASIO TERHADAP GURU
1.	BANGGAE	12	99	740	7,47
2.	BANGGAE TIMUR	20	167	1074	6,43
3.	PAMBOANG	25	121	809	6,69
4.	SENDANA	20	99	666	6,73
5.	TAMMERO'DO	9	48	383	7,98
6.	TUBO SENDANA	10	18	354	1967
7.	MALUNDA	12	59	581	9,85
8.	ULUMANDA	5	29	118	4,07

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majene*

#### **4. Kesehatan**

Pada tahun 2016 di Kabupaten Majene terdapat Rumah sakit = 1, Puskesmas = 11, Pustu = 34, Unit puskesmas keliling roda 4 = 13 unit dan roda 2 = 150 unit. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2014 antara lain : Dokter Umum

= 12orang, Dokter Gigi = 8 orang, Dokter Ahli = 3 Orang,  
 Apotker = 10 Orang, Paramedis perawatan = 218 orang,  
 paramedis non perawatan = 178 dan tenaga non medis = 38  
 orang.

**Tabel 6 :Jumlah Jenis Sarana Kesehatan Menurut  
 Kecamatan diKabupaten Majene, 2016**

No.	KECAMATAN	RSUD	PUSKESMAS	PUSTU	KLINIK	UNIT PUSKESMAS KELILING	
						RODA 4	RODA 2
1.	BANGGAE	1	2	2	-	2	18
2.	BANGGAE TIMUR	-	2	5	-	2	24
3.	PAMBOANG	-	1	6	-	1	23
4.	SENDANA	-	1	6	-	1	24
5.	TAMMERO'DO	-	1	4	-	1	20
6.	TUBO SENDANA	-	1	4	-	1	11
7.	MALUNDA	-	1	5	-	2	20
8.	ULUMANDA	-	2	2	-	3	12

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Majene*

## 5. Agama

Perkembangan pembangunan dibidang spritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing – masing agama. Tempat peribadatan umat islam yang berupa mesjid, langgar dan mushallah pada tahun 2013 masing – masing berjumlah 306, 49 dan 34.

**Tabel 7 :Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di  
Kabupaten  
Majene, 2016**

No.	KECAMATAN	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLAH	GEREJA
1.	BANGGAE	41	12	6	-
2.	BANGGAE TIMUR	48	8	11	1
3.	PAMBOANG	43	13	1	-
4.	SENDANA	49	1	2	-
5.	TAMMERO'DO	30	9	3	-
6.	TUBO SENDANA	23	3	1	-
7.	MALUNDA	31	3	3	-
8.	ULUMANDA	41	-	7	-

*Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Majene*

## **A. Hasil Penerapan *Good Enviromental Governance* Dalam Pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene**

Menurut UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Wilayah pesisir memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir.

Konsep awal pengembangan kawasan Majene *Waterfront City* ini adalah visi misi dari Bupati Kabupaten Majene yang dimana akan dilaksanakan secara bertahap karna ini menyangkut berbagai macam aspek dan butuh biaya yang sangat besar serta waktu pelaksanaan yang tidak sebentar. Mengenai kajian lingkungan, kajian dampak, itu adalah urusan dari pemerintah Bappeda dalam bidang pengembangan fisik dan prasarana sedangkan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang pengairan akan menangani infrastruktur mulai dari tanggul, jalan yang akan bersinggungan dengan pemukiman.

Dalam pembangunan Majene *Waterfront City* pengembangan kawasan bukan hanya berfokus terhadap lingkungan tetapi kawasan yang menyangkut berbagai aspek pembangunan di dalamnya baik itu

pemukiman, sarana penunjang, jalanan dan yang paling utama yaitu pembangunan tanggul awal.

Untuk mengetahui penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene, adapun yang dapat dipenuhi dalam melihat pengakuan aspek perlindungan lingkungan /ekosistem yang di kemukakan oleh (Putri, 2013) yang menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki sebuah indikator yaitu pemberdayaan masyarakat, transparansi, konsisten, kejelasan, dan penegakan hukum.

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar pembangunan.
- b. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi
- c. Konsisten merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam pembangunan
- d. Kejelasan merupakan wujud nyata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
- e. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama.

Berikut ini deskripsi dari hasil wawancara antara penulis dan informan yang dikaitkan dengan karakteristik pembangunan.

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**



Pembangunan yang merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan menggunakan kriteria (*Stakeholder*), kajian pembangunan masyarakat dapat dibedakan dalam fokus perhatian pembangunan masyarakat yang diselenggarakan oleh negara, masyarakat dan dunia usaha atau swasta. Konsentrasi pembangunan masyarakat yang diselenggarakan negara dapat mencurahkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan masyarakat., lembaga penyelenggara baik departemen, lintas departemen dan nondepartemen. Walaupun konsentrasinya berbeda, tetapi pada prinsipnya pembangunan masyarakat pada sektor apapun mengandung empat unsur yang menjadi kerangka dasarnya yaitu sebagai proses perubahan, menciptakan hubungan serasi antara kebutuhan dan sumber daya, pengembangan kapasitas dan bersifat multidimensi.

Berikut tanggapan *stakeholders* dari pihak pemerintah Kabid Pengembangan Fisik dan Prasarana (Fispra) Kantor Bappeda mengenai siapa saja yang diberdayakan dalam pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Mejene:

“*Waterfront City* itu terbagi atas Tiga segmen yaitu segmen satu pangali-ali, segmen dua labuang, dan segmen tiga dato. Di segmen satu termasuk kawasan kumuh dikarenakan masyarakat yang ada di Pangali-ali masih belum memperhatikan lingkungannya sering membuang sampah ke laut, buang air besar di laut, dan mandi di laut. Dengan adanya program pemerintah ini yaitu pembangunan *Waterfront City* mampu merubah masyarakat dan kawasan yang ada di Pangali-ali menjadi kawasan yang jauh lebih bersih, indah dan bermanfaat”. (Wawancara, IN,26 desember 2018)

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari Kasubid Pengembangan Fisik dan Prasarana (Fispra) Kantor Bappeda sebagai berikut:

“Pertama itu kan sebelum masuk kegiatan Kita lakukan *baseline* data yaitu melibat-Kan seluruh masyarakat kita turun ke Masyarakat untuk mendata apa-apa Yang diperlukan apa-apa permasalahan Yang ada di tiga segmen tersebut apaKendalanya jadi itulah nanti yang akan Kita cocokkan dalam pembangunan *Waterfront city*” (wawancara S 26 desember 2018)

Sementara itu adapun penjelasan yang diberikan oleh Kabid Pengairan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene sebagai berikut:

“Kalau pemberdayaan masyarakat otomatis Itu berawal dari titik mulanya memang Dari masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang kita lihat disini penataan Kawasannya Majene *waterfront city* cikalBakalnya itu karna posisi pemukiman Masyarakat di daerah cilallang, tanangan, Dan pangali ali itu sudah sangat dekat Dengan laut artinya segala macam itu Imbasnya akan berefek pada masyarakat Dikarnakan jarak terlalu dekat jadi lewat Majene *waterfront city* bagaimana Lingkungan itu di tata untuk mengurangi Dampak dari abrasi” (Wawancara SR 27 desember)

Tanggapan diatas menerangkan bahwa kawasan yang ada di Pangali Ali termasuk kawasan kumuh dikarenakan masyarakat kurang sadar dalam memperhatikan lingkungan hidup yang bersih, setelah pembangunan ini diharapkan masyarakat sadar dalam lingkungan hidup. Dengan adanya rancangan pemerintah yaitu pembangunan *Waterfront City* bisa membawa warga yang ada di lingkungan Pangali Ali sadar akan

lingkungan yang bersih indah dan bermanfaat. Selain untuk menata kawasan pesisir, tujuan dari pembangunan Majene *Waterfront city* ini adalah karena pesisir kota Majene berada di lokasi rawan bencana seperti gelombang pasang, abrasi, dan tsunami. Pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan berkembang di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Berbicara tentang pengembangan masyarakat tentu tak lepas dari berapa banyak kelompok yang diberdayakan dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene.

Berikut tanggapan salah satu dari Masyarakat lingkungan Pangali Ali tentang pemberdayaan masyarakat pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene, sebagai berikut:

“masyarakat kita disini dengan kepala lingkungan sementara kami benahi lingkungan artinya ada pembangunan baik itu pembangunan proyek besar-besaran di ondongan dengan ada di lorong-lorong cilallang. kami dari KOTAKU (kota tanpa kumuh) yang adakan saya juga sebagai ketua KSM yang ada membentuk kelompok swadaya masyarakat memasang peping ada pembangunan seperti WC dan MCK sementara kami benahi Alhamdulillah yang tadinya kawasan kami kawasan kumuh Alhamdulillah sekarang kawasan kami sudah lebih baik”(Wawancara H, 28 desember 2018)

Senada dengan tanggapan diatas peneliti mewawancarai salah satu Lurah yang ada di lingkungan Pangali ali terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Sebagai berikut:

“Alhamdulillah mulai awal tahun 2017 sampai sekarang sudah banyak program yang masuk di lingkungan pangali ali setelah pemerintah merancang pembangunan *Waterfront City* seperti pemberdayaan kota tanpa kumuh dengan melibatkan semua masyarakat dalam membenahi kawasan yang dulunya tampak kumuh sekarang bisa dikatakan berubah menjadi lingkungan yang bersih” (Wawancara HZ 28 desember 2018)

Menurut ketua KSM masyarakat dan kepala lingkungan yang ada di di lingkungan Pangali-ali saling bekerja sama dalam pembangunan *waterfront city* baik itu proyek besar-besaran seperti yang ada di ondongan dan lorong-lorong cilallang. Program dari pemerintah yaitu “KOTAKU” saya sebagai ketua kelompok membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk pemasangan peping dan juga pembangunan WC dan MCK dengan adanya program “KOTAKU” lingkungan yang ada di lingkungan pangali-ali dari kawasan kumuh kini berubah menjadi lingkungan yang bersih dan jauh dari kata kumuh. Program “KOTAKU” adalah jenis pemberdayaan dengan melibatkan semua masyarakat dalam pembangunan perencanaan menentukan program-program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan program ini tidak langsung membangun tetapi masyarakat itu sendiri yang menentukan masyarakat yang melihat sendiri apa yang perlu di benahi di dalam lingkungannya tersebut contohnya masyarakat yang melihat sendiri bahwa disini saya butuh “MCK” karena selama ini saya buang air di laut akhirnya program membuat “MCK” untuk rumah-rumah masyarakat atau

selama disini masyarakat setempat membuang sampahnya kelaut program membuat wadah tempat sampah dan pelibatan masyarakat yaitu disitu mereka ikut merencanakan.

## 2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam arti pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang di butuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

Salah seorang informan dari pihak pemerintah menjelaskan tentang bagaimana transparansi pengelolaan sumber daya pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene, yaitu sebagai berikut :

“berangkat dari aspirasi masyarakat tentang persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat kemudian apa solusi yang akan kita ambil dan berangkat dari situ bagaimana transparansi itulah nanti yang akan ditindak lanjuti apakah persoalan-persoalan yang timbul nanti masukan-masukan dari masyarakat kemudian apa yang perlu diperbaiki itulah yang akan dibenahi”(Wawancara S 26 desember 2018)

Senada dengan pernyataan diatas berikut tanggapan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa:

“Jelas ada karena ini kan ceritanya untuk Menanggulangi bahaya abrasi pantai Terhadap masyarakat jadi segala macam Apa yang akan di bangun oleh pemerintah Otomatis harus di informasikan kepada Masyarakat jangan sampai kita Membangun tidak sesuai

dengan Kebutuhan itu mubassir namanya” (Wawancara SR 27 desember 2018)

Begitupun yang dijelaskan oleh Kabid Pengembangan Fisik dan Prasarana Kantor Bappeda Kabupaten Majene. Sebagai berikut:

“Adanya sikap terbuka yang diambil dan Dilakukan dengan cara mematuhi Norma-norma yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang mengenai semua lapisan Masyarakat” (Wawancara IN 26 desember 2018)

Maksud dari tanggapan informan di atas adalah bagaimana cara atau upaya masyarakat menyampaikan secara langsung kepada pemerintah dan bagaimana cara pemerintah memberikan solusi dan disitulah transparansi berlangsung dan itulah nanti yang akan ditindak lanjuti oleh pemerintah persoalan-persoalan yang timbul jadi input untuk pekerjaan Fispra Bappeda Kabupaten Majene. Sesuatu yang dikerjakan pemerintah baik terkait aspirasi masyarakat atau kemauan masyarakat harus di informasikan kepada masyarakat dan pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene tidak hanya membangun wisatanya saja akan tetapi dapat menanggulangi dari bahaya abrasi pantai dengan demikian pembangunan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi masyarakat dan pemerintah yang diuntungkan.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:

“Terbuka sekali, bagus, mereka terima Artinya pemerintah turun langsung membantu baik itu dari Dinas PU ataupun dari BAPPEDA mereka kerja samaterintegrasi semua” (Wawancara H 28 desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat lain dalam wawancara sebagai berikut:

“Mengenai transparansi terhadap Pembangunan ini sudah sangat bagus Karena masyarakat dilibatkan langsungBaik dari sisi perencanaan sampai Terealisasinya pembangunan ini sudahSangat bagus dimata masyarakat” (Wawancara HZ 28 desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Mengenai sikap Transparansi Pemerintah terhadap Pembangunan *Waterfront city* dimataMasyarakat khususnya Pangali ali, cilallang, Dan labuang sudah Sangat bagus

### **3. Konsisten**

Konsisten adalah kunci sebuah keberhasilan dalam pembangunan *waterfront city* dan dapat menciptakan tata kelola yang baik merupakan salah satu wujud nyata yang harus di wujudkan dalam pembangunan *waterfront city* akan tetapi pembangunan tersebut yang ada di Kabupaten Majene belum sepenuhnya direalisasikan di sebabkan dalam pembangunan ini ada tiga segmen yaitu segmen satu pangali ali, segmen dua labuang, dan di segmen tiga dato'. Adapun pembangunan yang sudah terealisasikan adalah pembangunan segmen satu yang meliputi pembangunan kota tanpa kumuh serta pembangunan jalan yang ada di pangali ali.

Berikut peneliti wawancarai salah satu informan dari Dinas Pekerjaan Umum mengenai keberhasilan dalam pembangunan *waterfront city*, sebagai berikut:

“Salah satu unsur dari konsisten dalam Pembangunan ini adalah susanya pihak-Pihak yang berkaitan langsung denganPembangunan *waterfront city* dalam hal Satu pandangan dalam pembangunan ini dan Inilah yang menjadi masalah yang kamiHadapi dan harus ditindak lanjuti secepatMungkin”(Wawancara SR 27 desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat yang ada di lingkungan Pembangunan *Waterfront city*, sebagai berikut:

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala lingkungan dan masyarakat sudah melakukan pembenahan sedikit demi sedikit, yang artinya disini bahwa kawasan yang ditempati oleh pembangunan *Waterfront city* sudah terealisasi meskipun belum sepenuhnya dilakukan pembangunan secara besar. Masyarakat dan kepala lingkungan saling bekerjasama dalam membenahi lingkungan yang berupa kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat mendukung penuh dalam pembangunan *Waterfront City* yang ada di Kabupaten Majene.

#### **4. Kejelasan**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan atau proyek tertentu diperlukan suatu kejelasan tujuan pembangunan terlebih dahulu yang berarti bahwa pemerintah wajib memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, yang berarti pemerintah harus memperjelas dalam pengambilan keputusan baik berupa ekonomi sosial ataupun politik oleh pihak yang berkepentingan.



Adapun kejelasan dalam pembangunan *waterfront city* menurut informan dari Kasubid Pengembangan Fisik dan Prasarana Kantor Bappeda, sebagai berikut:

“sebelum masuk pembangunan kita sudah melakukan *baseline* data yang melibatkan seluruh masyarakat kita turun ke masyarakat untuk mendata apa-apa saja yang diperlukan apa-apa permasalahan yang ada di tiga segmen tersebut setelah kita dengar apa yang mereka inginkan disitulah kita sebagai pemerintah yang merancang program pembangunan majene *waterfront city* melakukan pembangunannya tidak secara langsung bersamaan tetapi secara bertahap”(Wawancara S, 26 desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Informan dari Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

“Mengenai kejelasan dalam pembangunan Ini kita hanya menunggu bagaimana Upaya-upaya pihak yang terkait bisa Sesegera mungkin atau mempercepat Pembangunan *waterfront city*” (Wawancara SR 27 desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga dating dari Kabid Pengembangan Fisik dan Prasarana Kantor Bappeda Kabupaten Majene sebagai berikut:

“Dengan adanya kejelasan antara Pemerintah dengan pihak-pihak yang Berkaitan langsung dengan pembangunanIni maka akan cepat pula direalisasikannyaPembangunan *waterfront city* ini” (Wawancara IN 26 desember 2018)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dijelaskan bahwa sebelum melakukan pembangunan pemerintah daerah melakukan atau menyusun *baseline* data yang dimana pemerintah daerah turun langsung ke masyarakat bertanya bahwa apa-apa saja diperlukan dalam membenahi

kawasan di pembangunan tersebut atau apa-apa saja permasalahan yang timbul di daerah pembangunan setelah bertemu langsung dengan masyarakat yang ada di tiga segmen pembangunan tersebut pemerintah mulai melakukan pembangunan walaupun tidak membangun secara bersamaan tetapi melakukan pembangunan secara bertahap.

## **5. Penegakan hukum**

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontrak, baik yang menyenangkan maupun yang tidak konflik. Dalam keadaan seperti itu hukum tidak diperlukan didalam masyarakat walaupun bagaimana rimitifnya. Manusia selalu sebagai subyek hukum menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama sebagai konsekuensinya, maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini terdapat persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia.

Adapun tanggapan dari informan mengenai penegakan hukum dalam menciptakan tata kelola yang baik. Yaitu sebagai berikut:

“kita kan ada amdalnya jadi sebelum kita kerja kita lihat dan kaji dulu bagaimana dampak lingkungannya karena biasanya itu yang akan menjadi permasalahan ketika kita melakukan pembangunan *waterfront city* tanpa kita kaji dulu lebih awal terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan makanya kita sudah buat

amdal jadi dalam amdal itu memberikan rekomendasi bahwa kita boleh melakukan pembangunan kawasan *waterfront city* sekaligus hal-hal yang mungkin akan kita lakukan perubahan terhadap ruang sudah tertuang dalam amdal tersebut” (Wawancara IN, 26 desember 2018 )

Adapun maksud dari informan diatas adalah pada awalnya pembangunan *waterfront city* pemerintah sudah mengkaji sejak awal melalui amdal. Jadi amdal tersebut memberikan seluruh informasi baik dampak permasalahan yang akan ditimbulkan serta amdal juga bisa melakukan perubahan terhadap pembangunan yang telah dilakukan.

Adapun jenis hukuman yang telah merusak dan melanggar dalam pembangunan kawasan majene *waterfront city* adalah sebagai berikut:

“tidak ada sanksi khusus yang diberikan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran disitu peran kita mulai dari pemerintah daerah sampai lembaga yang ada di masyarakat itu kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga ruang yang sudah kita bangun kecuali ada masyarakat melanggar di area pembangunan *waterfront city* yang memang bertentangan dengan hukum ya hukum yang akan menanganinya” (Wawancara, IN 26 desember 2018)

Maksud dari wawancara diatas adalah pemerintah tidak memberikan sanksi khusus terhadap masyarakat yang ingin merusak di area pembangunan *waterfront city* hanya saja jika ada masyarakat tertangkap sedang melakukan pelanggaran pemerintah daerah sampai lembaga yang ada di masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin merusak di area pembangunan tetapi jika ada masyarakat yang merusak dan itu bertentangan dengan hukum maka

hukum sendiri atau pihak berwajiblah yang akan menangani permasalahan tersebut.

Kehadiran hukum dalam masyarakat memang sangat diperlukan karena ukuran bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Apabila kehadiran hukum itu dilihat secara fungsional, maka ia terpenggil untuk melayani kebutuhan-kebutuhan elemen bagi kelangsungan hidup sosial, seperti mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa, meniadakan penyimpangan-penyimpangan, singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Di sini isi dari ketertiban itu sendiri tidak menjadi perhatian yang utama. Keadilan bukan merupakan lambing yang harus diwujudkan, bahkan dalam keadaan ekstrim di abaikan tetapi bagaimana juga kontrol dan ketertiban itupun sebenarnya dapat juga di ikat sebagai satu nilai tersendiri di dalam masyarakat, oleh karena itu ia merupakan suatu yang diberikan penghargaan oleh masyarakat.

## **B. Faktor Pendukungdan Faktor Penghambat Penerapan *Good Environmental Governance* Dalam Pembangunan *Waterfront City* di Kabupaten Majene**

Dalam melakukan suatu pembangunan tentunya terdapat faktor yang menunjang dan mempengaruhi keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang ataupun membantu keberhasilan penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene. Adapun faktor-faktor pendukung dalam pembangunan tersebut yang dikemukakan oleh beberapa informan.

a. Pemerintah

Berfungsinya sebuah pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan, guna terlaksananya penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan ini menurut informan adalah:

“jelas dari sisi kebijakan dari sisi dokumennya kemudian dari segi lingkungan itu semua adalah hal-hal yang mendukung sekarang bahkan sudah ada dari sisi kebijakannya bahwa pak bupati majene sudah merencanakan dari sisi dokumen sudah ada amdalnya kemudian antusias masyarakat itu sendiri jadi faktor pendukung dalam pembangunan *waterfront city*”(Wawancara S, 26 desember 2018)

Dilihat dari sisi kebijakan, sisi dokumen, dan lingkungan itu semua adalah faktor pendukung dalam pembangunan Majene *waterfront city* dan disisi kebijakan pak Bupati Kabupaten Majene telah merencanakan amdal dalam pembangunan tersebut. Antusias masyarakat jugalah yang menjadi faktor pendukung utama dalam pembangunan *waterfront city*.

## b. Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu faktor yang mendukung dalam pembangunan Majene *waterfront city*. Adapun faktor pendukung yang lain dari informan adalah sebagai berikut:

“saya kira segala elemen masyarakat harus mendukung jangan karena ada masalah sedikit demo lagi itukan bisa menghambat segala aktifitas pembangunan pokoknya sangat memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari pemerintahnya sampai masyarakat yang paling bawa”(Wawancara, SR, 27 desember)

Maksud dari informan diatas adalah segala elemen masyarakat harus mendukung dalam pembangunan Majene *waterfront city* karena tanpa dukungan dari masyarakat apalah arti pembangunan tersebut dan jika ada masalah atau keluhan dari masyarakat jangan pakai cara yang menghambat pembangunan seperti melakukan demo tetapi alangkah lebih baik jika masyarakat dan pemerintah saling mendukung dalam pembangunan tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan bisa menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.

### a. Ketersediaan bahan material

Adapun faktor penghambat menurut informan adalah sebagai berikut:

“saya kira faktor penghambatnya yaitu dari segi teknis ketersediaan bahan material karena bahannya ada masih ada alat pembangunan yang jarang ada di Majene tetapi kita bisa datangkan dari luar dan dananya bukan dari APBD tetapi kita pakai APBN langsung”  
(Wawancara, SR, 27 desember)

Maksud dari informan tersebut ialah kurangnya bahan material sehingga itu bisa menghambat pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan dan menurut informan diatas jika bahan yang di inginkan tidak ada di Kabupaten Majene pemerintah setempat bisa mendatangkan bahan-bahan material dari luar dan dana yang dipakai langsung dari dana APBN.

b. Partisipasi masyarakat

Adapun faktor penghambat menurut informan yang lain adalah sebagai berikut:

“jelas dari rendahnya partisipasi masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat dan tidak peduli itu yang kemudian akan menghambat pembangunan dan yang paling kita rasakan disini belum saling terintegrasinya antara OPD yang lain pekerjaan ini harus terintegrasi antara OPD satu dengan OPD yang lain itulah yang susah kita pertemukan dan itulah salah satu faktor penghambat kemudian jadi PR juga buat kita yaitu bagaimana caranya program ini bisa kita integrasikan ke masyarakat”(Wawancara S, 26 desember)

Adapun maksud dari informan tersebut adalah yang akan menghambat pembangunan tersebut jelas dari masyarakat itu sendiri dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat seakan tidak peduli dengan pembangunan tersebut kemudian belum terintegrasinya OPD satu dengan yang lain tidak adanya kepedulian terhadap pembangunan dan itu yang sangat sulit untuk dipertemukan kemudian itu menjadi PR untuk pemerintah

bagaimana caranya agar pembangunan ini bisa terintegrasi dengan masyarakat yang ada di area pembangunan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene yang direncanakan tidak akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Majene pada khususnya sebab pembangunan *waterfront city* akan merubah wajah kota Majene. Selain merubah wajah kota yang berpengaruh juga adalah interaksi masyarakat, dan akan merubah perilaku masyarakat sebab secara otomatis akan menyesuaikan pada keadaan yang telah berubah.

Berikut adalah hasil penelitian:



1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene sudah berjalan dengan efektif. Baik itu dari segi Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, Konsisten, Kejelasan, dan Penegakan Hukum.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene adalah Pemerintah dan Masyarakat.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene adalah Ketersediaan bahan material dan Partisipasi masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar lebih meningkatkan Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene yang sudah berjalan dengan efektif baik dari segi Pemberdayaan Masyarakat, Transparansi, Konsisten, Kejelasan, dan Penegakan hukum.
2. Disarankan agar Pemerintah dan Masyarakat saling berkomitmen dan bekerjasama terhadap Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene.

3. Perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene agar senantiasa memperhatikan Ketersediaan bahan material dan Partisipasi masyarakat pada Penerapan *good environmental governance* dalam pembangunan *waterfront city* di Kabupaten Majene.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2016. Pengertiandan 17 tujuansdgs. (Online) [www.markijar.com](http://www.markijar.com).Diakses padatanggal 04 Juni 2018, Pukul 10.48 WITA.
- Arianto, H. (2013, August). *ImplementasiKonsep Good Governance di Indonesia*, Forum IlmiahVol 3, No 02
- Darajat, A. (2010). *AktualisasiKonsep Good Governance DalamMengantisipasi MasalahKetenagakerjaanSebagai Salah SatuTantangan Pembangunan*, JurnalAdministrasiBisnisVol 6, No 1
- Faisah, N., &Prianto, A. L. (2015). *Good Environmental Governance (StudiKasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar)* Otoritas :JurnalIlmu PemerintahanVol 5, No 2
- Fitrianto, A. D. (2014). *Dasar Program PerencanaandanPerancanganArsitektur (DPA3) Penataan Waterfront Kali PepeDenganStudiKasusKawasanPeinanSurakarta* (Doctoral dissertation, UniversitasMuhammadiyah Surakarta)
- Hartono, Gusti. (2012). *Pembangunan Water Front City BerdasarkanPeraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum.2015

<http://mandarnews.com/2017/05/10/benahi-kawasan-pesisir-pemkab-rancang-majene-water-front-city/>

- Munandar, M. (2013). *Evaluasi Konsep Design Banten Waterfront City Kecamatan Kasemen*. Planesa, 4(2)
- Muljono. (2008) :*Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*. Jurnal Widyapratama1, No. 2 Desember 2008
- Notanubun, R. & Mussadun. (2017). *Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Ambon*. Biro Penerbit Planologi Undip, Volume 13(2): 243-255 Juni 2017
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2016-2021
- Putri, C. D. (2013). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Kota Madiun)*. Jurnal Administrasi Publik, 1(3), 42-5
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama
- Tondobala T, dan Tangkuman DJ (2011). *Arsitektur Tepi Air (Waterfront Architecture)*. Media Matrasain Vol 8 No. 2 Agustus 2011.
- Trianingsih, S. (2007). *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor*. SNA Makassar
- Ulum, M. C., & Nindana, Rispa. (2017) *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Briwijaya Press.

## DOKUMENTASI



Foto hasil wawancara dengan Kabid Pengembangan Fisik dan Prasarana (FISPRA) di kantor Bappeda Kabupaten Majene pada tanggal 26 Desember 2018.



Foto hasil wawancara dengan Kasubid Pengembangan Fisik dan Prasarana (FISPRA) di kantor Bappeda Kabupaten Majene pada tanggal 26 Desember 2018.



Foto hasil wawancara dengan Kabid Pengairan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene pada tanggal 27 Desember 2018



Foto hasil wawancara dengan Masyarakat sekaligus ketua KSM pangali ali pada tanggal 28 Desember 2018



Hasil pembangunan jalan yang tadinya tempat pembuangan kini berubah jadi jalan penghubung dari Ondongan, Pangali Ali, dan Labuang.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1660/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Mengadakan Observasi dan Pengumpulan Data Awal Pra Penelitian

Kepada  
Yth. : Bapak /Ibu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene  
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar di bawah ini:

Nama : Hijrawaty  
NIM : 10354 02059 14  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Penerapan Good Environmental Governance dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Konsep Waterfront City di Kabupaten Majene)

Untuk melengkapi tugas akhir penulisan skripsi maka yang bersangkutan mengadakan observasi dan pengumpulan data awal sebelum mengadakan penelitian olehnya itu kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu mahasiswa tersebut

Demikian permohonan ini atas perhatian, kerjasama dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katzirna.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Oktober 2018

Mengetahui,  
Wakil Dekan I,

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si  
NBM : 1084 366



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI**

No : 0712/A.3-II/IV/1439/2018

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Hijrawati  
S t a m b u k : 10564 02059 14  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

*"Penerapan Good Environmental dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Konsep Waterfront City di kabupaten Majene)"*

Pembimbing I : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

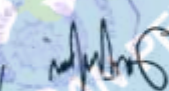
Pembimbing II : Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar

Pada Tanggal : 30 April 2018

Dekan,

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM : 7307 27.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Pa. 25 Faks. (0411) 865588

**LEMBAR KETERANGAN**  
**HASIL PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Nama : Hijrawati  
Stambuk : 10564 02059 14  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Proposal : Penerapan Good Eviron Mental Governance dalam Konsep  
Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Konsep Water Front City di  
Kabupaten Majene

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Ketua)	07/11-2018	
2	Dr. Anwar Parawangi, M.Si	03/12-2018	
3	Dr. Amir Muhiddin, M.Si	—	—
4	Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si	08/11-2018	

Makassar, 2018

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
RUBI HARJO, S.Si, M.Si

Wakil Dekan I

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 1850/FSP/A.1-VIII/XII/1440 H/2018 M  
Lamp. : I (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Hijrawaty  
S t a m b u k : 10564 02059 14  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Bappeda Kabupaten Majene  
Judul Skripsi : *"Penerapan Good Environmental Governance dalam Pembangunan Waterfront City di Kabupaten Majene"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 06 Desember 2018

D e k a n,  
Ub. Pembantu Dekan I

**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**  
NBM : 1084366



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 12 Majene Telp. (0422) 21514

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
No. 071/008/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. IRMA T. NILAWATI, SP  
Nip : 19691008 200003 2 004  
Jabatan : Kabid. Pengembangan Fisik & Prasarana BAPEDA Kab. Majene

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas

Nama : HJRAWATI  
NIM : 105640205914  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan penelitian pada Bidang Pengembangan Fisik & Prasarana Kantor BAPEDA Kab. Majene selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Penerapan Good Environmental Governance Dalam Pembangunan Waterfront City Di Kabupaten Majene".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

14 Januari 2018  
Kabid. Pengembangan Fisik & Prasarana  
  
A. IRMA T. NILAWATI, SP  
Nip. 19691008 200003 2 004



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

**SURAT KETERANGAN**  
**HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

Nama : Hijrawaty  
Nomor Stambuk : 10564 02059 14  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Penerapan Good Evironmental Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan Waterfront City

NO	Nama Tim Peneliti	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)	9/5-2019	
2	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si	9/5-2019	
3	Dr. Hj. Fatmawati, M.Si	10/5-2019	
4	Ahmad Harakan, S.IP, M.HI	9/5/2019	

Makassar, 9 Mei 2018  
Mengetahui :  
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## RIWAYAT HIDUP



HIJRAWATY, tempat tanggal lahir di Samalio 09 DESEMBER 1996, anakke 1dari 3 bersaudara, dari buahkasih pasangan Ayahanda “NurAeniS.Sos” dan Ibunda “Hasnawiah”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SD.

Negeri 4 Mekkatta dan selesai pada tahun 2008. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP. Negeri 3 Malunda dan selesai pada tahun 2011. Dan pada tahun yang sama pula penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 6 Majene dan selesai pada tahun 2014. Dan memasuki tahun 2014 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi di Makassar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2019.